



Mencermati demokratisasi dalam proses kepengurusan partai politik di Indonesia

Kaamiliaa Dewi^{1*}, Achmad Nurmandi¹, Helen Dian Fridayani¹

¹Department of Government Science, University Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, DI Yogyakarta-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: August 26, 2024

Diterima: Dec 02, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2025

KATA KUNCI:

Demokratisasi; partai politik; sistem politik.

KORESPONDEN:

Kaamiliaa Dewi

Department of Political Science,
University Muhammadiyah
Yogyakarta.

Email:

kaamiliaadewi01@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Kaamiliaa, D., Nurmandi, A., & Fridayani, H. D. (2025). Mencermati demokratisasi dalam proses kepengurusan partai politik di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 6 (2); 110-123.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.262>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.262>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This research aims to analyze the democratization process of political party management in Indonesia, focusing on recent democratic developments. Political parties play an important role in a democratic system, and the internal democratic leadership process within a party can reflect the overall quality of democracy. This research uses a qualitative method with data collection through documentation. The data collected is analyzed descriptively to describe the recent development of democratization of political party management in Indonesia. Research on political parties increasingly recognizes the importance of transparency and accountability. Political parties in Indonesia tend to focus on government power and ignore their own interests. Stricter control and accountability mechanisms have been implemented to reduce nepotism and corruption within parties. However, the management of political parties has not run optimally, this is characterized by conflicts of interest, weak coordination between government agencies, and technical constraints. This research still faces obstacles in obtaining secondary data related to the democratization of political parties. Therefore, it is important to involve analysis that considers aspects of long-term research. Feedback from readers is needed for future articles.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses demokratisasi kepengurusan partai politik di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan demokrasi terkini. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi, dan proses kepemimpinan demokratis internal dalam sebuah partai dapat mencerminkan kualitas demokrasi secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan perkembangan terkini demokratisasi kepengurusan partai politik di Indonesia. Penelitian terhadap partai politik semakin menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Partai politik di Indonesia cenderung fokus pada kekuasaan pemerintah dan mengabaikan kepentingannya sendiri. Mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang lebih ketat telah diterapkan untuk mengurangi nepotisme dan korupsi di dalam partai. Namun pengelolaan partai politik belum berjalan optimal, hal ini ditandai dengan adanya konflik kepentingan, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan kendala teknis. Penelitian ini masih menghadapi kendala dalam memperoleh data sekunder terkait demokratisasi partai politik. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan analisis yang mempertimbangkan aspek penelitian jangka panjang. Masukan dari pembaca sangat dibutuhkan dalam pembuatan artikel selanjutnya.

TENTANG PENULIS:

Kaamiliaa Dewi, saat ini sedang menempuh pendidikan Program Sarjana di Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Achmad Nurmandi, Penulis telah menyelesaikan studi Doktoral di bidang Administrasi Publik di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Penulis adalah Guru Besar di Departemen Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Minat penelitiannya adalah pada e-government, tata kelola pemerintahan kota dan manajemen strategis di sektor publik dan telah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional dan Book Chapter, seperti International Journal of Public Sector Management, Transforming Government: Masyarakat, Kebijakan dan

Proses, Jamba Journal of Disaster Studies, Asian Review of Political Science, Journal of Human Behavior in the Social Environment, Public Policy and Administration, Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy and Governance, Springer.

Helen Dian Fridayani, Penulis telah menyelesaikan studi Doktorat di bidang ilmu politik di National Cheng Kung University, Taiwan pada tahun 2023. Penulis adalah dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Minat penelitiannya adalah pada isu-isu pemerintah daerah, pembangunan perkotaan dan pedesaan, dan kebijakan publik.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses demokratisasi kepengurusan partai politik di Indonesia dengan fokus pada perkembangan demokrasi terkini. Dalam konteks modern, demokrasi menjadi topik yang sangat relevan dan mendapat perhatian global, tidak hanya dalam tata kelola pemerintahan atau sistem politik, namun juga dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga kemajuan demokratisasi adalah melalui analisis pengelolaan partai politik. Partai politik berperan sebagai lembaga penting dalam sistem demokrasi, sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dan berperan dalam pembentukan kebijakan negara. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan bagaimana partai-partai tersebut dipimpin, bagaimana mereka berkomunikasi dengan anggota dan masyarakat luas, dan sejauh mana mereka dapat mewakili kepentingan publik.

Mencermati proses demokratisasi dalam kepengurusan partai politik di Indonesia sangatlah penting guna menjamin kinerja sistem politik negara ini secara efektif dan akuntabel. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat termasuk partai politik sangat penting dalam menjaga kesehatan demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Akan tetapi, melibatkan banyak partai politik di Indonesia mengalami kesulitan terkait tata kelola internal yang demokratis. Secara terminologis, demokrasi berarti *demos kratos* yang berarti pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kedaulatan, seringkali berada di tangan rakyat. Di era digital, partai politik dapat menggunakan platform online dan media sosial untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Hal ini memungkinkan anggota partai dan pemilih untuk berinteraksi, berbagi ide, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, demokratisasi partai politik dapat mencakup lebih beragam suara dan perspektif. Kemajuan teknologi berperan dalam partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik, anggota kelompok dalam pengambilan keputusan, dan sebagainya (Sandi et al., 2023). Salah satu ciri penting penelitian ini adalah peran perempuan dalam kepemimpinan politik, yang merupakan bagian penting dalam demokratisasi.

Pembaruan internal partai politik harus melibatkan seluruh anggota dan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab partai elit. Komitmen untuk menciptakan struktur inklusif yang penting dalam proses demokratisasi yang efektif, dimana setiap suara anggota dihargai dan dipertimbangkan. Diperlukan konsistensi dalam melakukan upaya untuk memperkuat pengawasan dan keseimbangan pada struktur organisasi partai. Diperkirakan dapat memicu terciptanya lingkungan politik yang lebih sehat dan adil. Agar dapat mengatasi isu ini, partai politik perlu menerapkan sistem pengawasan dan keseimbangan dalam struktur organisasi mereka. Dengan adanya sistem yang transparan dan jelas, risiko terbatasnya kekuasaan dapat dikurangi. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan dan memperkuat dukungan pihak-pihak di kalangan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip demokrasi dalam kepengurusan partai akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ini, langkah krusial adalah melakukan reformasi internal yang fokus pada demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan adil. (Ghafur, 2018).

Seringkali partai politik menunjukkan ciri-ciri oligarki, di mana kekuasaannya tidak hanya terbatas pada sedikit orang, yang dapat berpotensi menuju otoriter. Kepengurusan partai

politik seringkali tidak hanya menyulitkan anggota partai untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung demokratisasi internal melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pelaksanaannya masih belum memenuhi harapan. Selain itu, terdapat upaya untuk mendorong demokratisasi partai politik dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan dominasi pemimpin politik, yang sering digunakan untuk memutuskan dan mengontrol arah partai politik. Partai-partai politik di Indonesia menghadapi masalah kehilangan orientasi ideologis mereka yang sejati karena perubahan yang signifikan. Partai politik di Indonesia menjadi konsumen utama demokrasi yang dihasilkan oleh kekuatan sosial lain seperti media, masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, akademisi, buruh, nelayan, perempuan, dan kelompok penekan lainnya dalam pembangunan politik. Peran aktif masyarakat sipil dan lembaga penegak hukum dalam memantau dan menyalahkan partai politik sangatlah penting. Pemimpin politik dalam demokratisasi tidak hanya mencerminkan masyarakat demokratis tetapi juga mempengaruhi politik negara yang ada di Indonesia (Pal, 2023).

Demokrasi yang sehat dan berjalan dengan baik sangat mengandalkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan partai politik. Di Indonesia, di mana partai politik memainkan peran sentral dalam sistem pemerintahan, hal ini penting untuk memastikan bahwa proses internal partai mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Pembentukan partai politik yang signifikan dan upaya untuk mewujudkan partai politik melalui tahapan yang tidak biasa (Mahmudi, 2020). Sistem pemerintahan demokratis yang disepakati berusaha diadaptasi oleh setiap warga negara (Ummatin, 2020). Bagi negara demokrasi, kehadiran partai politik merupakan hal penting di dalamnya terdapat perwakilan rakyat yang terlibat dalam pemerintahan (Lesmana et al., 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian meningkat terhadap praktik pemilihan pimpinan partai yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk nepotisme dan dinasti politik. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan demokrasi, namun juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai lembaga yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Kondisi ini mendorong perlunya reformasi dalam struktur dan mekanisme pengambilan keputusan di partai politik. Salah satu langkah krusial adalah memastikan bahwa pemilihan pimpinan partai dilakukan secara transparan dan bebas dari pengaruh keluarga, sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses tersebut. Selain itu, penetapan peraturan dan batasan masa jabatan pimpinan partai yang jelas menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas (Sulardi, 2020).

Pentingnya demokrasi dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia terlihat dari pentingnya fungsi partai politik sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi keadaan demokrasi partai politik di Indonesia, dengan fokus pada prinsip-prinsip penting yang perlu dicermati dan diterapkan secara cermat untuk mencapai tujuan demokrasi. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam memperbarui kepengurusan anggota partai, yang merupakan bidang penelitian baru. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai demokratisasi kepengurusan partai. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana proses demokratisasi internal partai politik di Indonesia berkontribusi terhadap penguatan sistem demokrasi nasional?

KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini mengenai kepengurusan partai politik yang melibatkan demokratisasi di dalamnya, pada penelitian terdahulu berfokus pada partisipasi anggota partai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menilai dinamika internal partai politik dalam rangka proses demokratisasi. Partai politik menjadi komponen utama dalam sistem demokrasi dan memiliki

tugas untuk mengartikulasikan kehendak publik, mengadakan pendidikan politik, mengembangkan dan menawarkan alternatif kebijakan serta menyediakan pilihan politik kepada masyarakat dalam pemilu (Imansyah, 2012). Kepengurusan partai dengan kewenangan yang desentralistik tidak akan menciptakan sebuah demokrasi di tingkat lokal pada partai politik, karena praktik demokrasi internal partai yang sangat sentralistik, serta oligarkis (Solikhin, 2017). Partai politik demokrasi memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, politik, dan aktivitas partai lainnya. Anggota kelompok harus mampu mengekspresikan ide, merumuskan agenda, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Chairiyah & Komarudin, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Areza et al., 2023) mengenai demokratisasi dalam proses rekrutmen kepengurusan menunjukkan sebagian besar partai politik masih menerapkan nepotisme dalam proses rekrutmen sehingga melanggar prinsip demokrasi yang tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011. Penelitian yang dilakukan oleh (Areza et al., 2023) memiliki persamaan dan perbedaan peneliti, diantaranya: semua kajian yang dilakukan peneliti dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi demokratisasi di partai politik, hal ini memiliki fokus penelitian lebih pada perekrutan kader dibandingkan pemilihan ketua umum atau aspek hukum lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Sukimin, 2023) mengenai demokratisasi sebagai kunci keberhasilan partai politik mengatakan bahwa keberhasilan sebuah partai tergantung pada praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sukimin, 2023) memiliki persamaan dan perbedaan peneliti, diantaranya: beberapa penelitian menyebutkan bahwa demokratisasi merupakan faktor utama keberhasilan suatu partai politik. Hal ini memiliki fokus yang lebih pada hasil akhir dari praktik demokrasi dibandingkan pada prosesnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2023) mengenai problematika dan upaya perwujudan demokratisasi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang digunakan dalam rekrutmen dan masa jabatan ketua umum yang tidak dibatasi secara demokratis. Penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2023) memiliki persamaan dan perbedaan peneliti, diantaranya: kondisi internal partai dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di negara tersebut. Hal ini Memiliki fokus pada menyelesaikan suatu masalah praktis dalam implementasi demokratisasi dibandingkan pada aspek hukum atau teori.

Penelitian mengenai demokratisasi dalam struktur partai politik di Indonesia melibatkan dua kelompok peneliti, yaitu peneliti berpengalaman dan peneliti baru, dengan metode dan fokus penelitian yang berbeda. Peneliti sebelumnya lebih fokus pada aspek sosial budaya dan struktur kelembagaan partai, dengan penelitian mengkaji bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial mempengaruhi dinamika internal partai. Mereka biasanya menggunakan metode kualitatif dan teori pembangunan klasik untuk mengkaji unsur-unsur yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan peneliti baru mempunyai cakupan lebih luas, mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan teknologi dalam kerangka kepengurusan partai politik. Mereka menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi partai politik, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data. Kedua kelompok juga berbeda-beda dalam metode penelitian yang mereka gunakan. Peneliti lama cenderung memilih pendekatan deskriptif kualitatif ketika mengkaji demokratisasi internal partai, sementara peneliti baru lebih menyukai metode yang serupa tetapi dengan tambahan data kuantitatif untuk studi tentang partisipasi publik dalam politik partai. Fokus penelitian kelompok ini bermula dari pandangan mereka terhadap demokratisasi: peneliti senior menekankan struktur kelembagaan dan norma sosial dalam membangun sistem politik yang demokratis, sedangkan peneliti junior lebih fokus pada penggabungan berbagai aspek dalam proses demokratisasi. Kedua kelompok sepakat bahwa keterlibatan komunitas lokal sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan partai politik. Namun, mereka mempunyai pendekatan berbeda mengenai cara mencapai demokratisasi dalam manajemen partai. Untuk

mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama semua pihak untuk melaksanakan proses rekrutmen kader dan pengurus secara jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan dan memperkuat legitimasi partai politik.

Kepengurusan partai politik mencerminkan kondisi sosial yang digunakan untuk memperkuat kekuatan kelompok dan menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk meningkatkan kepengurusan partai lebih demokratis, harus ada dukungan dari berbagai anggota. Hal ini perlu diperkuat. aturan dan peraturan yang ada. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, inklusi yang terlibat dalam demokratisasi kepengurusan partai. Perubahan dalam struktur dan proses partai juga diperlukan untuk mencapai tujuan demokrasi dengan lebih baik. Harapannya, dengan memperkuat peran partai politik, serta bisa menjadi lembaga yang lebih responsif dan terhubung dengan masyarakat serta memperkuat demokrasi secara keseluruhan (Komarudin & Raman, 2020). Selanjutnya, peneliti mencoba membuat 2 kerangka teori yang berkaitan dengan demokratisasi kepengurusan partai politik, diantaranya:

Teori Kelembagaan Partai Politik

Teori kelembagaan partai politik memiliki peran krusial dalam memahami dinamika demokratisasi dalam pengelolaan partai. Kelembagaan partai politik menunjukkan cara partai berperan sebagai institusi yang terorganisir dan beroperasi dalam konteks sosial, politik, serta ekonomi yang lebih luas. Menurut (Wawan Kuswandro, 2015), institusionalisasi partai adalah proses di mana organisasi menetapkan cara untuk berjalan dan berhubungan dengan lingkungan luarnya. Dalam hal ini, partai politik tidak hanya berperan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan, melainkan juga sebagai organisasi yang harus mampu mengatur dukungan dari masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung di sekitarnya. Proses demokratisasi dalam kelembagaan partai politik tercermin dari cara partai mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam struktur dan operasionalnya. Partai yang terorganisir dengan baik akan memiliki prosedur yang jelas untuk pengambilan keputusan, pendaftaran anggota, serta sistem akuntabilitas yang transparan. Penting untuk memastikan bahwa setiap pihak dalam partai dapat berpartisipasi secara setara dan aktif, sehingga menghasilkan iklim demokratis di dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya, institusionalisasi partai politik juga berhubungan dengan penguatan identitas nilai serta otonomi partai. Partai yang kokoh secara struktural akan dapat menjaga kemandiriannya dari pengaruh luar, seperti tekanan dari pemerintah atau kelompok kepentingan lainnya. Terdapat konteks demokratisasi, seringkali menggunakan kemampuan suatu partai dalam menginternalisasi prinsip-prinsip kelembagaan akan mempengaruhi stabilitas sistem politik secara keseluruhan. Dengan cara inilah, partai dapat lebih memusatkan perhatian pada kepentingan konstitusinya dan melaksanakan beberapa fungsi penting, seperti mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Selain itu, kelembagaan partai politik yang bisa menjalin koneksi yang solid dengan masyarakat sipil dan memiliki kedalaman di komunitas akan lebih mudah menjaga dukungan suara mereka seiring waktu.

Teori Lahirnya Partai Politik

Lahirnya partai politik adalah fenomena yang sangat berkaitan dengan proses demokratisasi dan berperan sebagai mekanisme kunci dalam sistem pemerintahan dan representasi. Sesuai dengan penjelasan para ahli, partai politik hadir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mengorganisir kepentingan yang beragam di masyarakat, mendukung partisipasi politik warga, dan mengatur persaingan dalam pemilihan umum. Seiring dengan perkembangannya, partai politik memiliki fungsi penting dalam konsolidasi demokrasi dengan bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintahan, mengagregasi serta mengartikulasikan kepentingan publik ke dalam kebijakan, dan berperan sebagai alat rekrutmen serta pembinaan pemimpin politik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, partai politik

kerap menghadapi hambatan dalam melaksanakan fungsi-fungsi idealnya, seperti adanya oligarki internal, pragmatisme politik yang mengesampingkan ideologi, serta politik transaksional yang rawan terhadap praktik korupsi.

Hal ini dilakukan, karena untuk memaksimalkan peran partai politik dalam memperkuat demokrasi, beberapa langkah perbaikan yang bisa diambil antara lain adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas internal partai, memperkuat sistem kaderisasi, serta mendorong keterlibatan aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan partai. Dalam konteks Indonesia, salah satu masalah krusial yang harus diperhatikan adalah proses demokratisasi di dalam partai politik. Proses demokratisasi ini memiliki peranan krusial karena UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan partai politik untuk berfungsi sebagai kontestan pemilihan umum serta menyuarakan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan posisi yang strategis itu, partai politik berperan untuk mendengarkan dan memperjuangkan keinginan masyarakat serta menjalankan fungsi representasi politik dengan efektif (Ayuningsih & Aulia, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada demokratisasi partai politik di Indonesia. Studi ini menggunakan data literatur dari perpustakaan dan artikel di jurnal, buku, dan berita selama lima hingga sepuluh tahun terakhir. Data sekunder diperoleh dari 30 jurnal dan 55 berita online yang masih berkaitan dengan topik yang sama tentang demokratisasi dalam pengelolaan partai politik di Indonesia dalam penelitian ini. Hasil data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan fokus penelitian sebagai pedoman dengan menggunakan aplikasi software Nvivo yang mencerminkan pengumuman demokratisasi partai politik. Hal ini dapat menghasilkan kesimpulan yang penulis harapkan. Berita apa pun yang sudah dikumpulkan kemudian di Ncapture dan diproses melalui Nvivo 12 Plus.

Tahap kedua adalah Reduksi Data, yaitu tahap yang bertujuan untuk menyeleksi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya tahap Analisis Data yaitu tahap yang bertujuan untuk mengkategorikan dan menganalisis data yang telah direduksi sebelumnya. Dengan demikian penelitian dibagi menjadi empat tahap, yaitu: 1) Pengumpulan bertujuan untuk mengumpulkan data berupa buku, data grafis, artikel ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian; 2) Reduksi data bertujuan untuk memilah dan memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian, dan rumusan masalah; 3) Analisis data merupakan tahapan penting dimana data dianalisis untuk memperoleh nilai dan makna untuk menjawab rumus; 4) Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menggeneralisasikan hasil yang telah ada.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai demokratisasi partai politik di Indonesia dari subjek pertama hingga subjek lain yang sejenis, digunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuannya untuk mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan terkait demokratisasi partai politik di Indonesia melalui data literatur seperti data perpustakaan, artikel jurnal, buku, serta berita. Proses ini membantu merancang strategi demokratisasi kepengurusan partai politik yang sesuai dengan konteks lokal, dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demokratisasi dalam kepengurusan partai politik merupakan aspek penting untuk mewujudkan sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik berperan krusial dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, proses internal partai politik, terutama dalam hal pengurusan, harus mencerminkan nilai-nilai demokratis yang dijunjung tinggi dalam sistem politik nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa kepengurusan partai politik

di setiap tingkatan harus dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan pengurus partai dilakukan secara terbuka, adil, dan melibatkan partisipasi anggota partai. Namun, dalam praktiknya, tantangan dalam implementasi prinsip demokratisasi masih sering muncul (Sukimin, 2023).

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah kecenderungan oligarki dalam tubuh partai politik, dimana segelintir elit mendominasi pengambilan keputusan, termasuk pemilihan pengurus. Kondisi ini dapat mengakibatkan kurangnya regenerasi kepemimpinan dan terbatasnya ruang bagi kader-kader baru untuk berkembang dalam struktur partai, yang tentunya bertentangan dengan semangat demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya konkret dalam memperkuat mekanisme demokratisasi internal. Proses pemilihan pengurus partai harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota, sehingga dapat mendorong munculnya calon-calon pemimpin berkualitas yang memiliki dukungan luas (Ghafur, 2023).

Selain itu, penting bagi partai politik untuk memperkuat sistem kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggotanya. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader yang memiliki kapasitas dan integritas untuk menduduki posisi kepemimpinan di masa depan. Dengan adanya kader berkualitas, regenerasi kepemimpinan dalam partai dapat berjalan lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada segelintir elit. Aspek kesetaraan gender juga harus diperhatikan dalam proses demokratisasi ini, meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengamanatkan adanya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam posisi strategis. Peran pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, sangat penting dalam mendorong demokratisasi internal partai politik. Melalui kewenangan verifikasi dan pemeriksaan terhadap anggaran dasar partai politik, pemerintah dapat memastikan bahwa mekanisme pemilihan pengurus telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada partai politik mengenai pentingnya penerapan demokrasi internal. Dalam konteks yang lebih luas, demokratisasi dalam kepengurusan partai politik memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas demokrasi di tingkat nasional. Partai politik yang dikelola secara demokratis cenderung lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas, sehingga memperkuat legitimasi sistem demokrasi di mata publik (Ghafur, 2023).

Teori Kelembagaan Partai Politik yang dikemukakan oleh Jamaludin Ghafur menyoroti pentingnya demokratisasi internal dalam partai politik. Ghafur menyatakan bahwa partai harus diorganisasikan secara demokratis agar efektif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Jika proses internal tidak demokratis, program-program demokrasi partai tidak akan sepenuhnya berhasil. Jamaludin Ghafur menilai revisi undang-undang seperti UU Nomor 2 Tahun 2008 bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi dan partai politik di Indonesia dengan mendorong penerapan demokratisasi di dalamnya. Ghafur menekankan, partai politik harus menerapkan tiga bidang utama dalam proses demokratisasi internal: pencarian calon, pengambilan kebijakan, dan keberhasilan kepemimpinan. Penting untuk memastikan keterlibatan seluruh anggota partai dalam proses pengambilan keputusan. Meski ada tuntutan hukum untuk menjalankan proses demokratisasi internal, namun sebagian besar partai masih enggan karena lebih fokus pada kesatuan kepengurusan dibandingkan membahas persoalan demokratisasi yang bisa menimbulkan kelainan (Ghafur, 2023).

Sementara itu, Teori Lahirnya Partai Politik yang dikemukakan oleh Muhammad Jafar AW dan Azies Bauw menekankan pada faktor sosial dan politik yang mendorong terbentuknya partai politik. Mereka berpendapat bahwa partai politik muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyuarkan aspirasi dan kepentingan politiknya. Dalam situasi ini, partai dipandang sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik secara sah. Jafar dan Bauw menegaskan bahwa terbentuknya partai politik erat kaitannya

dengan dinamika sosial yang ada; Partai berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat serta mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam kebijakan publik. Tujuan utama didirikannya partai politik adalah untuk menguasai kekuasaan dan melaksanakan program yang mencerminkan ideologi dan keinginan anggotanya. Dengan begitu, partai memiliki peran penting dalam meningkatkan kekuatan demokrasi dengan memberikan suara kepada rakyat (Aw & Bauw, 2015). Kedua teori tersebut memberikan gambaran yang mendalam tentang peran dan fungsi partai politik dalam konteks demokrasi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Analisis demokratisasi partai politik yang ada di Indonesia lebih menonjol dibandingkan dengan sistem pemerintahan, pemilu, transisi kepemimpinan reguler, peran partai politik, partisipasi politik, pendidikan politik, dan transparansi. Hal ini dikarenakan, partai politik memainkan peran penting dalam proses demokrasi, yang memungkinkan warga negara berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, serta menjamin keberlanjutan demokrasi dengan memantau dan mengendalikan pemerintahan melalui pemilu yang bebas dan transparan.

Penelitian sebelumnya yang dikutip dalam teori demokratisasi kepengurusan partai politik yang dikemukakan oleh Jamaludin Ghafur pada tahun 2023, hal ini menunjukkan pentingnya teori demokrasi dalam pengembangan partai politik Indonesia, khususnya dalam konteks reformasi. Penelitian ini mengkaji perubahan dan perkembangan teori demokrasi partai politik sesuai dengan perubahan politik dan sosial di Indonesia. Teori yang dikemukakan Jamaludin Ghafur menyoroti aspek krusial demokratisasi kegiatan partai politik dengan melakukan Pembinaan Program Partai yang ditonjolkan melalui pemilihan pimpinan partai (Ghafur, 2023).

Partai politik di Indonesia terbagi menjadi dua kategori penting yang harus diperhatikan. Pertama, kategori demokratisasi mencakup aspek sistem pemerintahan yang demokratis, pemilu yang adil dan terbuka, serta transisi kepemimpinan yang teratur. Kedua, kategori peran partai politik meliputi partisipasi aktif politik anggota partai dan masyarakat, pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran politik, dan transparansi kegiatan dan keputusan partai untuk menjaga akuntabilitas kepada publik. Dalam konteks ini, teori Ghafur mengemukakan bahwa proses seleksi kepemimpinan harus mencakup partisipasi aktif dan demokratis anggota partai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemimpin partai dipilih secara adil dan mencerminkan aspirasi seluruh partai. Selain pemilihan kepemimpinan, teori Ghafur menekankan pentingnya demokrasi dalam hal anggota tim. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat pada era reformasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anggota partai politik di Indonesia.

Demokratisasi Partai Politik

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya ialah demokratisasi partai politik, yang meliputi pemilihan secara demokratis untuk menentukan pemimpin partai. Partisipasi anggota partai dalam kegiatan partai adalah aspek penting dari demokrasi yang diatur oleh partai. Partai politik yang bersifat demokratis menyediakan kesempatan bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, aktivitas politik, dan event partai lainnya. Manajemen partai politik mencerminkan kondisi sosial yang mampu memperkuat kekuatan kelompok dan menangani isu-isu yang melibatkan serta mewakili kepentingan yang beragam. Agar kepemimpinan partai lebih demokratis, dukungan dari semua anggota sangat diperlukan. Ini harus didukung oleh aturan dan ketentuan yang tegas. Keterlibatan, transparansi, akuntabilitas, dan inklusi harus menjadi fokus utama. Selain itu, modifikasi pada sistem dan proses partai juga dibutuhkan untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan demokrasi. Diharapkan dengan memperkuat fungsi partai politik, mereka bisa menjadi institusi yang lebih

sensitif dan terhubung dengan masyarakat serta memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan dapat menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam partai politik untuk mencapai sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil (Ghafur, 2023). Terdapat Teori Ghafur pada penjelasan selanjutnya,

Teori Ghafur menekankan bahwa partai politik harus mengembangkan strategi yang efektif untuk merekrut anggota baru dan memperluas basis keanggotaannya. Dari sudut pandang anggota, demokrasi menekankan partisipasi dan keterlibatan aktif anggota kelompok dalam pengambilan keputusan dan kegiatan kelompok. Konsep “Das Sollen” dan “Das Sein” yang diperkenalkan oleh Ghafur menjelaskan perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dalam demokrasi partai politik (Das Sollen) dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini, namun harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi (Das Sein). Demokratisasi pengambilan keputusan kelompok memastikan bahwa keputusan kelompok didasarkan pada proses yang terbuka dan inklusif yang mempertimbangkan aspirasi anggota kelompok. Meskipun terdapat kemajuan dalam demokratisasi partai politik di Indonesia, teori Ghafur merupakan teori yang paling akurat. Subyek ini masih menunjukkan ruang untuk perbaikan. Teori ini menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan pemimpin yang bersih dan profesional. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola partai politik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Saat ini, pengembangan pemimpin kulit putih dan pemimpin profesional akan menjamin efektivitas otoritas di partai politik. Penelitian terdahulu secara umum telah mengidentifikasi teori Jamaludin Ghafur 2023 yang menyoroti pentingnya demokrasi dalam kepengurusan partai politik di Indonesia. Konsep ini menekankan perlunya demokrasi dalam pemilihan pimpinan partai, komposisi keanggotaan, dan proses pengambilan keputusan, yang digunakan untuk memperkuat demokrasi internal partai di masa depan (Ghafur, 2023).

Dalam penelitiannya, Ghafur berfokus pada peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan konstitusi. Ia menemukan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi partisipasi masyarakat di era digital modern, memungkinkan pemerintah dan lembaga publik memberikan layanan yang lebih cepat, lebih inklusif, dan lebih demokratis. Ghafur juga menekankan pentingnya peran lembaga kedaulatan dalam menjamin keberlanjutan demokrasi. Menurutnya, keberadaan lembaga berdaulat menentukan masa depan NKRI. Hal ini juga menunjukkan bahwa demokrasi yang ideal memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi (Ghafur, 2024).

Jamaludin Ghafur tidak secara langsung mengusulkan sistem pemerintahan dalam penelitiannya pada tahun 2023. Penelitian yang dipaparkan Jamaludin Ghafur pada tahun 2023 berfokus pada analisis sistem pemerintahan presidensial dan multi partai di beberapa negara, serta implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan dan demokrasi. Dalam penelitian ini, Jamaludin Ghafur tidak mengusulkan sistem pemerintahan tersendiri. Sistem pemerintahan yang dikemukakan Jamaludin Ghafur tidak secara langsung memberikan contoh konkrit dari sistem yang diusulkan sendiri.

Penelitian yang dipaparkan Jamaludin Ghafur berfokus pada analisis sistem pemerintahan presidensial dan multi partai di beberapa negara, serta implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan dan demokrasi. Berdasarkan penelitian Jamaludin Ghafur, ia menyatakan bahwa pada tahun 2023, harus ada pemilu yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang kuat. Pemilu berkualitas tinggi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, memberikan kesempatan yang sama bagi semua kandidat dan pemilih, dan menjamin partisipasi yang adil bagi semua partai yang berpartisipasi.

Partai politik di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokratisasi negara. Pengamat politik Ignas Kleden menilai partai politik di Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemberi dan pencipta kekuasaan yang sah. Partai politik di Indonesia

menghadapi banyak kendala pada era demokrasi yang ditandai dengan transformasi dan reformasi yang substansial. Permasalahan yang signifikan adalah tidak adanya partai politik yang efektif, yang mengakibatkan runtuhnya sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan kolaborasi partai politik lawan di kabinet, antara lain dukungan gotong royong yang diwakili oleh Prabowo Subianto yang merupakan rival Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Pola pikir ini juga menandakan adanya bahaya besar yang secara perlahan menghancurkan demokrasi yang dicapai dengan susah payah sepanjang era Reformasi. Mereka memainkan peran penting dalam sistem politik, termasuk dalam pemilihan umum, pembentukan kebijakan, dan pengawasan pemerintah. Berbagai partai politik aktif di Indonesia, seperti: Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, PDIP Partai, dan Partai Gerindra, telah menjadi bagian dari proses demokratisasi sejak awal berdirinya. Salah satu tantangannya adalah pembentukan partai politik sendiri (Ulum, 2020).

Namun partai politik di Indonesia tidak berperan signifikan dalam produksi demokrasi seperti media, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan masyarakat sipil. Perubahan signifikan dalam kehidupan politik Indonesia pasca Orde Baru, seperti berkembangnya sistem multi partai, telah memunculkan beberapa permasalahan. Misalnya, banyaknya jumlah partai politik dalam suatu pemilu dapat mempersulit pembentukan pemerintahan yang stabil dan efektif. Hal inilah yang menjadi gambaran umum sistem politik Indonesia saat ini. Dalam konteks demokratisasi internal partai politik, undang-undang Partai Politik secara tegas mengamanatkan bahwa pemilihan ketua partai harus dilakukan secara demokratis (Saleh, 2008).

Pemilu yang efektif didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, dengan setiap aspek proses pemilu bersifat transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Pemilu yang ideal mendorong partisipasi masyarakat, baik sebagai pemilih maupun pengamat, dalam proses pemilu. Salah satu contoh kampanye pemilu yang dilakukan oleh Jamaluddin Ghafur adalah pemilu yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023. Agar informasi yang diberikan dapat diandalkan dan akurat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat bekerja keras untuk memantau dan melaporkan kampanye pemilu. Oleh karena itu, prinsip Jamaludin Ghafur dapat diterapkan secara internasional untuk menciptakan proses pemilu yang demokratis dan transparan sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar. (Ghafur & Wardhana, 2019).

Pergantian kepemimpinan yang teratur sangat penting bagi stabilitas politik dan kelangsungan kepemimpinan. Prinsip ini mencerminkan esensi demokrasi dan pemerintahan yang baik. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpinnya, memberikan keterwakilan dan partisipasi politik, serta mencegah pemusatan kekuasaan. Transisi kepemimpinan yang damai adalah kunci stabilitas politik jangka panjang. Hal ini merupakan pilar fundamental demokrasi modern, yang menjamin stabilitas politik dan kelangsungan pembangunan nasional.

Rotasi kepemimpinan yang teratur sangat penting bagi stabilitas politik dan pembangunan nasional. Pemilihan umum harus dilakukan secara bebas, adil, dan transparan sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin sesuai dengan harapannya. Melalui rotasi kepemimpinan, masyarakat dapat memilih arah kebijakan negara dan memastikan keterwakilan politik yang tepat. Hal ini juga membuka peluang perbaikan dan ide-ide baru dalam tata kelola. Memilih kepala negara yang memiliki visi dan misi yang jelas akan memajukan kepentingan rakyat. Rotasi pemerintahan yang terjadwal mencegah kekuasaan absolut dan memastikan prioritas kepentingan rakyat. Rotasi kepemimpinan juga berfungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menghindari monopoli kekuasaan. Dengan demikian, warga negara berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan

negara dan menjamin integritas serta komitmen pemimpin terhadap kepentingan rakyat (Eko Prasetya, 2013).

Peran Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia

Partai politik memberikan wadah untuk menyatukan dan mengintegrasikan berbagai ide dan aspirasi. Aktivitas partai politik berkontribusi dalam membentuk gagasan dan merumuskan kebijakan yang mencerminkan keberagaman sosial. Selain itu, partai politik juga mempunyai peluang untuk mengambil keputusan kebijakan yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat yang diwakilinya. Dalam konteks demokrasi, partai politik memegang peranan penting dalam membentuk kepentingan dalam sistem politik suatu negara, termasuk Indonesia (Arianto, 2004).

Muhammad Jafar Aw dan Azies Bauw adalah dua tokoh yang memaparkan teori demokrasi untuk kepengurusan partai politik pada tahun 2004. Teori yang mereka kemukakan adalah untuk mendorong partai politik memiliki struktur dan proses demokrasi. Menurut teori ini, demokrasi dalam organisasi kelompok melibatkan peningkatan partisipasi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan dan pemilihan pemimpin. Jafar Aw dan Bauw menekankan pentingnya pemberdayaan anggota tim dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan transparan. Salah satu aspek penting dari konsep ini adalah partisipasi anggota partai dalam pengambilan keputusan. Jafar Aw dan Bauw merekomendasikan agar partai politik terlibat aktif dalam memastikan partisipasi anggota partai dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Kegiatannya dapat berupa forum debat, rapat umum, atau pemilihan internal. Dalam konteks ini, partai politik dianggap sebagai platform bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan mempengaruhi kebijakan partai (Muhammad Jafar AW, 2017).

Muhammad Jafar Aw dan Azies Bauw menekankan pentingnya partisipasi sosial yang aktif dalam proses demokrasi dalam penelitiannya pada tahun 2004 yang bertajuk "Peran Partai Politik dalam Demokrasi Indonesia". Menurut Muhammad Jafar Aw dan Azies Dalam kajian Bauw, keterlibatan sosial dapat digolongkan menjadi tiga jenis: aktivis, partisipan, dan pengamat. Pemangku kepentingan mengacu pada individu yang terlibat langsung dalam politik dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan. Partisipan mengacu pada individu yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam politik, namun memantau dan mempengaruhi keputusan politik dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan lainnya. Pengamat adalah individu yang tidak terlibat dalam kegiatan politik, namun aktif mengamati dan memahami proses politik serta memberikan pendapat dan kritik.

Muhammad Jafar Aw dan Azies Bauw menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan kesadaran akan hak-hak sipil. Mereka percaya bahwa mereka dapat meningkatkan tingkat partisipasi sosial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengetahuan dan hak-hak politik, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam hak-hak politik. Selain itu Muhammad Jafar Aw dan Azies Bauw juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Mereka percaya bahwa partisipasi warga negara dapat memastikan bahwa keputusan politik dibuat demi kepentingan terbaik masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat (Aw & Bauw, 2015).

Muhammad Jafar AW dan Azies Bauw merupakan dua politisi yang berperan penting dalam pendidikan politik bangsa Indonesia pada tahun 2004. Mereka berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Salah satu kontribusi utama Jafar AW dan Bauw adalah menyampaikan ceramah politik di berbagai acara, termasuk acara pengorganisasian masyarakat, perkemahan, dan acara partai politik. Saat ini, mereka sedang menjelaskan pandangan dan pendapat politiknya sekaligus mendorong masyarakat untuk terlibat dalam politik. Selain itu, mereka mendorong debat publik untuk membahas isu-isu politik yang sebenarnya.

Jafar AW dan Bauw juga aktif menulis buku dan artikel tentang berbagai topik politik, mulai dari sejarah politik Indonesia hingga analisis kebijakan pemerintah dan strategi pengembangan partai politik. Karya-karyanya digunakan sebagai bahan referensi atau buku teks di jurusan ilmu politik di universitas tersebut. Selain itu, Jafar AW dan Bauw juga terlibat dalam pelatihan kader politik, khususnya bagi kader partai politik yang ingin meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam berkampanye. Materi pelatihan mencakup topik-topik seperti komunikasi politik, strategi kampanye, manajemen partai, dan kepemimpinan politik (Idrus Affandi, 2000).

Sebagai tokoh politik yang aktif terlibat dalam pendidikan politik masyarakat, Muhammad Jafar AW dan Azies Bauw secara konsisten menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Mereka memahami bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset utama bagi mereka untuk terus memberikan kontribusi yang berarti bagi proses demokratisasi di Indonesia. Salah satu bentuk transparansi yang diterapkan oleh Jafar AW dan Bauw adalah keterbukaan informasi terkait aktivitas mereka. Mereka secara berkala mempublikasikan laporan pertanggungjawaban dan dokumentasi kegiatannya, baik melalui media massa maupun saluran komunikasi yang dikelola oleh organisasi atau partai politik di mana mereka terlibat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memahami secara efektif apa yang telah mereka capai. Selain itu, juga dikenal memiliki komitmen kuat dalam menjunjung tinggi integritas dan menghindari konflik kepentingan.

Jafar AW dan Bauw secara konsisten berupaya memisahkan peran publik dan privat, serta menjaga independensi dalam memberikan pandangan dan analisis politik. Transparansi Jafar AW dan Bauw juga terlihat dari keterbukaannya dalam menerima masukan, kritik, dan evaluasi dari banyak pihak terkait kegiatan pendidikan politiknya. Mereka percaya bahwa proses demokrasi akan diperkuat dengan partisipasi aktif dan masukan dari masyarakat. Muhammad Jafar AW dan Bauw terhadap transparansi dan akuntabilitas publik membuat mereka dipercaya dan dihormati sebagai tokoh politik oleh masyarakat umum. Hal ini semakin memperkuat peran dan pengaruh mereka dalam upaya peningkatan intelijen politik di Indonesia.

KESIMPULAN

Mencermati proses demokratisasi dalam pengambilan keputusan pada kepengurusan partai politik di Indonesia sangatlah penting guna menjamin kinerja sistem politik negara ini secara efektif dan akuntabel. Anggota kelompok harus mampu mengemukakan gagasan, merumuskan agenda, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kelompok. Selain itu, organisasi kelompok yang demokratis menekankan kesetaraan dan inklusi. Partai politik yang demokratis harus mendorong partisipasi anggotanya dari berbagai latar belakang, termasuk perempuan, kelompok minoritas, dan kelompok miskin. Namun pengelolaan partai politik belum dilaksanakan secara optimal, ditandai dengan adanya konflik kepentingan, kurangnya koordinasi antar pemerintah, dan kendala teknis. Penelitian ini masih kurang dalam memperoleh data sekunder terkait demokratisasi partai politik. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan analisis yang mempertimbangkan aspek penelitian jangka panjang. Hal ini, sangat dibutuhkan masukan dari pembaca dalam pembuatan artikel selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Areza, T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. (2023). Demokratisasi dalam proses rekrutmen kepengurusan partai politik di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 19. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4862>

Arianto, H. (2004). Peranan Partai Politik. *Lex Journalica*, 1(2), 77–89.

Aw, M. J., & Bauw, A. (2015). Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal*

- Ayuningsih, N., & Aulia, V. (2024). Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Berbagai Kelompok Masyarakat. *Jurnal ...*, 1(3), 558–569. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1572%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/download/1572/1451>
- Chairiyah, S. Z., & Komarudin, U. (2019). Demokratisasi dan Tantangan Kelembagaan Partai Politik di Indonesia: Suatu Analisis Politik Dalam Periode Pemilu Tahun 2009-2019. *Prosiding Seminar Nasional XXVIII AIPI*, 1–16.
- Eko Prasetya. (2013). *Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia*.
- Ghafur, J. (2018). Democratizing Political Parties Institution Through Checks and Balances Mechanism. *Proceedings of International Conference "Internationalization of Islamic Higher Education Institutions Toward Global Competitiveness*, 225–240.
- Ghafur, J. (2023). Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 1–25. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>
- Ghafur, J. (2024). *Kampanye Pemilu dan Janji Politik*. Fakultas Hukum UII. <https://law.uii.ac.id/blog/2018/12/04/kampanye-pemilu-dan-janji-politik-oleh-jamaludin-ghofur-s-h-m-h/>
- Ghafur, J., & Wardhana, A. F. G. (2019). *Presidential threshold : sejarah, konsep, dan ambang batas persyaratan pencalonan dalam tata hukum di Indonesia* (cetakan pe). Setara Press.
- Idrus Affandi. (2000). Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik. *Modul Pendidikan Politik*, 1–19. <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>
- Imansyah, T. (2012). Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. *Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 1–21.
- Komarudin, U., & Raman, A. (2020). *Sistem sosial dan politik Indonesia* (Muchlis (ed.)). PT Pencerah Generasi Antarbangsa.
- Lesmana, C., Suryadi, K., & Anggraeni, L. (2021). Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Publisitas*, 8(1), 11–18. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.62>
- Mahmudi, M. (2020). Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Negara Dan Keadilan*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.5046>
- Muhammad Jafar AW. (2017). Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Pemda – Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 10(6), 132–140. <https://stisipbantenraya.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Peranan-Partai-Politik-Dalam-Demokrasi-Di-Indonesia.pdf>
- Pal, L. A. (2023). Public governance. In *The Elgar Companion to the OECD*. <https://doi.org/10.4337/9781800886872.00032>

-
- Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan partai politik. *Legislasi Indonesia*, 5(1), 56–80.
- Sandi, T., Areza, M., Akbar, F., Ikhsan, E., Nasution, M., & Utara, U. S. (2023). Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4862/http>
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2120>
- Sukimin. (2023). Demokratisasi Pemilihan Ketua Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 4(1), 82–91.
- Sulardi, S. (2020). Building Quality of Democracy and Democratization of Political Party's Leader Election. *Jurnal Media Hukum*, 27(1), 33–43. <https://doi.org/10.18196/jmh.20200140>
- Ulum, M. B. (2020). Indonesian Democracy and Political Parties After Twenty Years of Reformation: a Contextual Analysis. *Indonesia Law Review*, 10(1), 29–44. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.577>
- Ummatin, K. (2020). Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i1.23>
- Wawan Kuswandro. (2015). *Teori Pelembagaan Partai Politik Huntington*. Universitas Brawijaya. <http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/teori-pelembagaan-partai-politik-huntington/>
- Wicaksono, A. T. (2023). Problematika dan upaya perwujudan demokratisasi kelembagaan internal partai politik. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(November).